

HAK-HAK ASASI MANUSIA: TANTANGAN BAGI AGAMA

FRANZ MAGNIS-SUSENO, SJ

Apa yang sudah sejak lama dibisik-bisik, sesudah jatuhnya pemerintahan Soeharto menjadi terbuka lebar di depan mata bangsa Indonesia. Yaitu bahwa di belakang segala omongan Orde Baru tentang Pancasila, UUD 1945, kesatuan dan persatuan dlsb. ada hal-hal mengerikan terjadi di negara kita. Apa yang terjadi dalam "insiden-insiden" yang selama bertahun-tahun diperkecil, seperti "peristiwa" Dili, "peristiwa Lampung", "peristiwa Tanjung Priok", apa yang terjadi dalam operasi yang bertahun-tahun lamanya berlangsung di Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur, yang jauh dari perhatian masyarakat dan tidak mudah ditembus: Ternyata secara rutin dilakukan kekejaman dan kejahatan luar biasa. Puluhan ribu orang telah terbunuh di luar pertempuran dan tanpa proses pengadilan, termasuk wanita dan anak-anak. Pemerkosaan wanita-wanita sebangsa Indonesia maupun Timor Timur telah menjadi rutin. Ratusan ribu penduduk selama bertahun-tahun hidup dalam suasana ketakutan.

Berhadapan dengan perbuatan-perbuatan mengerikan itu kita tidak hanya sedih dan kaget. Dalam kita juga muncul kesadaran kuat bahwa seharusnya saudara sebangsa kita, bahkan orang siapa pun, tidak pernah boleh diperlakukan seperti itu. Semua orang yang hati nuraninya belum ditumpulkan oleh pamrih ganas, atau karena mereka sudah biasa melakukan kekejaman, atau karena ditutup-tutup oleh kefanatikan sebuah ideologi, mesti langsung menyadari bahwa dalam keadaan apa pun tak pernah orang dapat dibenarkan diperlakukan dengan cara-cara seperti itu.

Keyakinan ketakwajaran prinsipil inilah yang terungkap dalam konsep *hak asasi manusia*. Dengan istilah itu kita menyatakan bahwa manusia, karena ia manusia, berhak atas perlakuan yang sesuai dengan

martabatnya dan karena itu, perlakuan yang tidak manusiawi tak pernah dapat dibenarkan.

Adalah kekuatan paham hak asasi manusia bahwa di dalamnya terungkap suatu kesadaran prinsipil: Bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mendahului penetapan oleh masyarakat atau negara. Hak-hak asasi manusia merupakan batasan terhadap kedaulatan negara, sang *leviathan* (Hobbes) yang mau menganggap diri sama dengan Tuhan, yang merasa boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya karena mempunyai kekuatan di atas segala kekuatan lain. Paham hak asasi manusia mengungkapkan bahwa segenap kekuasaan, termasuk kekuasaan negara, ada batas wewenangnya. Karena itu paham hak asasi manusia merupakan salah satu sarana terpenting untuk melindungi keutuhan kemanusiaan dalam masyarakat pasca-tradisional. Sebuah negara dapat disebut beradab atau tidak tergantung dari apakah di dalamnya hak-hak asasi manusia dihormati atau tidak. Tuntutan hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prinsip terpenting dalam etika politik modern.

Nah, yang mengganjal adalah bahwa paham begitu penting itu justru tumbuh di luar teologi Gereja-Gereja. Adalah Revolusi Prancis (1789) yang pertama kali bicara tentang "*droits de l'homme*", hak-hak manusia. Sedangkan untuk waktu lama Gereja-Gereja masih menolak paham itu. Dalam Gereja Katolik baru Paus Johannes XXIII mengakui secara resmi nilai tinggi pernyataan PBB tentang hak-hak asasi manusia dalam ensikliknya "*Pacem in terris*" (1963).

Padahal dasar paham hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa manusia mempunyai martabat yang istimewa, bahwa ia, lain dari binatang, bernilai pada dirinya sendiri dan tidak pernah boleh dipakai semata-mata sebagai sarana (sedangkan kalau martabat itu ditolak, tak ada alasan mengapa orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu tidak boleh dikorbankan demi manusia lain, dijadikan budak atau kelinci percobaan bagi industri obat atau diberantas saja sebagai hama). Dan meskipun filsafat dapat mengajukan pelbagai pertimbangan untuk mendukung adanya martabat khas manusia itu, akan tetapi pendasarannya yang sungguh-sungguh kuat kiranya hanya mungkin secara teologis: Segenap orang bernilai pada dirinya sendiri dan harus dihormati sebagai nilai pada dirinya sendiri, karena ia secara pribadi dipanggil dan dicintai untuk selamanya oleh Allah. Karena Allah mau menyelamatkan kita, kita harus saling menghormati keutuhan martabat kita.

Maka harus dikatakan bahwa tuntutan untuk menghormati martabat segenap orang sebagai manusia, jadi untuk menghormati hak-hak

asasi manusia, adalah sama hakikinya seperti perintah "kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri" adalah hakiki apabila kita mau melaksanakan perintah "kasihilah Tuhan Allahmu ... " (Mat 22:37ss). Tak mungkin kita mengasihi Allah apabila kita tidak sepenuh tenaga berusaha membangun tatanan hidup bersama di mana hak-hak asasi manusia terjamin.

Adalah cukup memalukan bahwa selama lebih dari seribu tahun Gereja Kristus tidak tanggap terhadap implikasi hakiki ajaran Injil itu. Padahal Yesus sendiri berulang-ulang menegaskan bahwa Ia ditemukan dalam saudara yang miskin, lemah, dan tertindas. Namun, Gereja lama sekali mengabaikan dimensi "horisontal" Injil Yesus itu. Gereja hanya memperhatikan garis vertikal: Semuanya langsung ditarik pada Allah, hubungan dengan sesama dilihat semata-mata dari sudut dosa dan pengampunan. Tetapi bahwa Gereja diutus untuk menjadi raga yang mengubah pola kehidupan bersama manusia yang berdasarkan penindasan dan kebencian sedemikian rupa hingga makin sesuai dengan martabat segenap orang dan kelompok orang sebagai manusia tidak dilihat (Kesadaran akan implikasi sosio-politik ini mulai berkembang sejak bagian kedua abad lalu, waktu Gereja menjadi sadar akan "masalah sosial").

Sekarang peran kunci hak-hak asasi manusia dalam membangun kehidupan sosial-politik yang baik, adil, dan beradab sepenuhnya diakui oleh Gereja. Adalah tantangan bagi teologi Indonesia untuk menempatkan perjuangan demi hak-hak asasi manusia di pusat kesadaran umat Kristiani Indonesia. Ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dalam kehidupannya merupakan sumbangan berharga Gereja kepada bangsa Indonesia, sumbangan tanpa pamrih karena memperjuangkan hak-hak asasi manusia menguntungkan semua. Tak ada cara lebih mendasar untuk mewujudkan solidaritas dengan segenap warga masyarakat, terutama dengan mereka yang lemah, miskin, dan tertindas, daripada berjuang demi penegakan hak-hak asasi manusia. Apabila kita mau menjamin bahwa kejahatan-kejahatan mengerikan yang terjadi di tengah-tengah kita tidak diteruskan, kita harus sepenuh tenaga memperjuangkan, bersama seluruh bangsa, hormat terhadap hak-hak asasi manusia.